



RENJA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya dalam memberikan kekuatan sehingga Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025, ini dapat disusun dan diselesaikan.

Dengan selesainya Rencana Kerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua.

Dalam penyusunan dokumen ini masih perlu perbaikan untuk kesempurnaan dokumen Renja pada tahun berikutnya dan kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua kedepannya.

Jayapura, 26 Pebruari 2025



KEPALA BIRO,

LINDA .S. ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II.....	6
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan	8
2.3.Reviu terhadap RKPD dapat dilihat pada Tabel terlampir.....	8
2.4.Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
2.5.Tumpang Tindihnya Urusan Pada SKPD.....	12
2.6.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III.....	27
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	27
3.2 Program dan Kegiatan.....	34
BAB IV.....	36
PENUTUP	36

LAMPIRAN

- **RENJA 2025**
- **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH PRVINSI PAPUA YA, 2024 - 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun, sebagai penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Biro Organisasi TA. 2024-2026 memuat rencana pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan, dengan adanya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Biro Organisasi menetapkan target yang akan dicapai pada masa transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 yang kemudian dapat diimplementasikan dalam penetapan Renja Biro yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Biro Organisasi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah ataupun Rencana perubahan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Rancangan Rencana Kerja dan Rencana Perubahan merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah..

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir
- e. Penetapan

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bito Organisasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang APBD Provinsi Papua;
8. Peraturan Gubernur Papua nomor 1 tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Provinsi Papua;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi dari visi dan misi Biro Organisasi, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program yang mengacu pada RKPD dan berpedoman pada RENSTRA SKPD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 dan RPD Tahun 2024- 2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2025.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja Tahun 2025.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4. **Sistematika** Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Riview terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Organisasi meliputi seluruh program dan kegiatan, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan RENSTRA Biro, melalui evaluasi akan diketahui capaian kinerja, output dan outcome, apa yang menjadi kendala , serta rencana aksi yang akan dilakukan.

Pada tahun 2025 Biro Organisasi melaksanakan 2 Program yaitu :

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	17	3.979.988.000,00
2	Program Penataan Organisasi	2	8	2.600.000.000,00
	TOTAL Rp			6.579.988.000,00

Tabel pelaksanaan Renja 2025 dapat dilihat pada lampiran.

Dibawah ini terdapat realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Biro Organisasi TA. 2024

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	(-/+)
1	Belanja Operasi	Rp.4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp.1.151.755.450,-
	a. Belanja Pegawai	Rp.	Rp.	Rp.
	b. Belanja Barang & Jasa	Rp. 4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp. 1.151.755.450,-
	c. Belanja Hibah	Rp.		Rp.
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.		
2	Belanja Modal	Rp.		
JUMLAH BELANJA		Rp.4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp. 1.151.755.450,-

Tahun 2024 Biro mendapat anggaran perubahan sebesar Rp. 1.151.755.450,-, atau 22%, dari anggaran induk dan realisasi belanja TA. 2024 sebesar Rp. 5.205.169.833,-atau (99,30) persen, dengan anggaran tersebut Biro Organisasi tetap berkomitmen untuk mencapai target pada RENSTRA.

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	PERSENTASE
1	BELANJA OPERSIONAL	5.241.901.510	5.205.169.833.00	99,30
2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.241.901.510	5.205.169.833.00	99,30
	JUMLAH	5.241.901.510	5.205.169.833.00	99,30

Pengukuran IKU Biro Organisasi Tahun 2019 sd 2023 dan Pengukuran IKU Biro Organisasi Tahun 2019 sd 2023 dibandingkan Dengan Capaian Dan Target Pada RPJMD Provinsi Papua, dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 terlampir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Renja 2024 merupakan tahun ke-1 setelah selesai masa kepemimpinan Gubernur TA. 2019-2023 dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 sebagai pedoman pembangunan untuk TA 2024-2026, Indikator Kinerja Biro Organisasi yang termasuk dalam RPD Provinsi Papua terdiri atas 3 Indikator, tergambar Tabel 1.3 Terlampir.

2.3. Reviu terhadap RKPD dapat dilihat pada Tabel terlampir

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Biro Organisasi telah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai TUSI Organisasi, Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan riil organisasi telah terekam ataukah belum. dapat dilihat pada lampiran Renja 2025 terlampir.

Indikator Kinerja Biro Organisasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada RPD 2024-2026 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua TA 2024-2026, terdiri atas :

Tabel 1.3

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2026
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67	75,05	80,05	80,50	80,50
2	Nilai SAKIP	Nilai	66,05	75,39	80,05	80,50	80,50
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	95	95	95	95	95

Dari ke3 indikator tersebut dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan 2025 Biro Organisasi belum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam RPD namun Biro organisasi tetap berkomitmen karena target tersebut bukan semata -mata menjadi tanggungjawab Biro Organisasi tetapi merupakan kewajiban bersama dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk papua maju dan mandiri.

2.4. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka isu-isu strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) kelompok isu strategis sebagai berikut:

1. **Terwujudnya *kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:***

“Salah satu tugas Biro Organisasi antara lain untuk menyiapkan bahan kebijakan penataan desain struktur tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mendasarkan pada keseimbangan beban kerja sehingga tidak terjadi duplikasi maupun kekosongan penyelenggaraan tugas fungsi.

“Penataan birokrasi pemerintah daerah yang menjadi isu sentral saat ini adalah perlunya reformasi birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata masing-masing daerah. Keberadaan organisasi perangkat daerah untuk mengakomodir kewenangan daerah dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi akan membentuk konfigurasi besar. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien.

Kondisi riil di daerah yang masih relevan saat ini terkait kelembagaan di daerah bahwa adalah belum dilaksanakan penyesuaian peraturan terkait pelaksanaan pemerintahan baik di pemerintah pusat dan pemerintahan di papua, dimana yang diharapkan pemerintah pusat agar dilaksanakan penyetaraan jabatan serta penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan belum dilaksanakan di provinsi papua, hal ini mengakibatkan kelembagaan di Provinsi Papua masih sangat besar sehingga regulasi yang dikeluarkan dari pemerintah pusat belum dapat diterapkan dengan baik di provinsi bahkan kabupaten kota di Papua.

2. ***Adanya Kewenangan Kekhususan***

Kewenangan kekhususan Provinsi Papua sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan Daerah Provinsi Papua sesuai undang undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sehingga diperlukan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai salah satu kekhususan tersebut;

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua telah mengakomodirnya dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perdasus ini mengaktualisasikan kekhususnya dalam kelembagaan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di papua, hal ini ditindaklanjuti dengan disusunnya Perda dan Perbup/Perwal di Kabupaten Kota pada tahun yang sama tentang kelembagaan perangkat Daerah dan kelurahan, Pengaturan kelembagaan yang melaksanakan urusan kekhususan dimaksudkan sebagai dasar bagi perangkat daerah di Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang mengawal dan memastikan urusan Kelembagaan Pemda Provinsi Papua dapat menjadi salah satu alat dalam memberikan kontribusi pembangunan bagi masyarakat di tanah Papua.

3. ***Fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten /Kota***

Terbentuknya organisasi perangkat daerah di Kab / Kota sesuai dengan besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah,

cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria, pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan.

2.5. Tumpang Tindihnya Urusan Pada SKPD

Dalam hal melakukan penataan kelembagaan di wilayah provinsi papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perangkat Daerah beserta turunannya peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengakomodir penataan kelembagaan perangkat daerah, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik di daerahnya. Pada umumnya kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota dibentuk untuk melaksanakan tugas yang berdasarkan pemetaan urusan yang dibuat Pada peraturan pemerintah ini. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat di beberapa Kabupaten/kota yang mempunyai kemiripan nama bagian atau sub bagian, sehingga mengambil alih fungsi atau tugas dari dinas/badan yang mempunyai tugas teknis tersebut. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya ketidaksesuaian dan keselarasan Urusan tugas / Tupoksi antara SKPD. Di masing-masing Kabupaten/Kota.

1. Koordinasi **Pemerintah** Kabupaten/Kota pada Pemerintah Pusat

Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas membina, memfasilitasi kabupaten/kota yang berada dalam cakupan wilayah pemerintahannya dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah agar Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria, pembentukan suatu organisasi perangkat daerah untuk ditetapkan

2. **Penataan SDM aparatur yang kompeten dan proporsional**

Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.

Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu.

Dengan cara membagi isi pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh hasil kerja rata-rata satu orang, maka akan memperoleh waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pekerjaan tersebut. Atau akan memperoleh jumlah pegawai

yang dibutuhkan melalui jumlah jam kerja setiap pegawai tersebut.

Dalam manajemen kepegawaian, kegiatan penerimaan dan penempatan pegawai mutlak harus dilakukan didalam satu unit organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Kegiatan manajemen kepegawaian adalah kegiatan untuk mendapatkan landasan guna penerimaan dan penempatan pegawai yang pada awalnya dilakukan terlebih dahulu melalui analisis jabatan (job analysis) yang berpedoman pada PERMENPAN RB Nomor 11 /2024 tentang Jabatan Pelaksana dilingkungan Instansi Pemerintah, yang berarti suatu kegiatan untuk memberikan gambaran tentang syarat-syarat jabatan (job specification) yang diperlukan bagi setiap pegawai yang akan diterima dalam menduduki suatu jabatan didalam suatu organisasi.

Perencanaan kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat baik jumlah dan waktu, maupun kualitas baik kuantitatif maupun kualitatif yang dirinci menurut jabatan dan unit kerja. Dengan demikian perencanaan, perekrutan, penempatan dapat dilakukan sesuai kompetensi dan proporsional. kebutuhan ANJAB dan ABK serta Evaluasi sangat dibutuhkan bahkan menjadi dasar penilaian tambahan penghasilan bersyarat bagi ASN. kedepan besaran tunjangan kinerja akan dihitung sesuai dengan kelas jabatan (job grade). Kelas jabatan untuk masing-masing jabatan struktural ataupun fungsional disusun berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang dilakukan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Jabatan yang dievaluasi adalah jabatan-jabatan sesuai hasil Analisis Jabatan dengan beberapa faktor penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing.

3. Meningkatkan **Kualitas Pelayanan Publik**;

Pelayanan publik menjadi wacana menarik dewasa ini. Yang dibicarakan berkisar dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak, semakin beragamnya produk pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara negara hingga derasnya arus pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik. Tak pelak lagi, inilah salah satu perkembangan luar biasa dalam dinamika pembangunan di wilayah Papua. Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan publik, ada keinginan memperkaya ragam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat, pun tak lupa senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Berbagai upaya penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu pelayanan dan peningkatan efisiensi biaya pelayanan terus-menerus disempurnakan oleh setiap unit penyelenggara pelayanan.

Peningkatan semangat melayani masyarakat juga dibarengi dengan makin terbukanya pola pikir Pemerintah dalam pelibatan masyarakat guna merumuskan perbaikan proses pelayanan. Keterbukaan ini masih ditambah dengan kesediaan menerima dan mengelola keluhan masyarakat yang merupakan umpan balik penyempurnaan proses pelayanan publik. Pelayanan publik, sebagaimana tertuang dalam UU 25/2009, dimaknai sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang ini mewajibkan negara memberikan pelayanan publik bagi setiap warga negara.

Menindaklanjuti undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Peraturan

Gubernur terkait hal tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Ini berarti, negara berkewajiban dan bertanggungjawab atas pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakatnya demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Ada kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain:

1. Standar Pelayanan, Pemerintah perlu menetapkan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik. Hal ini mencakup waktu layanan, kualitas layanan, dan aspek lain yang memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang memadai.
2. Survei Kepuasan Masyarakat, Survei secara berkala harus dilaksanakan untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan. Hasil survei ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau peningkatan layanan jika diperlukan
3. Forum Konsultasi Publik, Forum ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan layanan publik. Forum ini penting dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peran serta masyarakat terkait aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam kaitannya terhadap pelayanan publik. Forum ini bisa meliputi pertemuan langsung, diskusi daring, atau mekanisme lain yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan, atau keluhan mereka

Ketiga kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua ini

bertujuan untuk menilai sejauh mana penyelenggara layanan publik khususnya perangkat daerah telah mencapai tujuan mereka dan seberapa baik mereka telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat terlihat melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota di Wilayah Papua.

Tujuan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.

Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Upaya penataan Tata Laksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan dalam beberapa kegiatan:

1. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Naskah Dinas
2. Penyusunan Peraturan Gubernur Papua tentang Pakaian Dinas
3. Penyusunan Peta Proses Bisnis
4. Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
5. Peningkatan Penataan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang cara

melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah daerah. Lima kegiatan tersebut di atas merupakan komponen penting dalam tata laksana pemerintahan.

4. Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan

Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa diartikan sebagai suatu petunjuk organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku. SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja/petugas dalam melakukan/menyelenggarakan pekerjaan mereka. Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam hal pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat. Penerapan SOP dalam pelayanan pemerintahan perlu diperhatikan antara struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan serta dikaitkan dengan beberapa hal penting dalam penerapan SOP, yakni: efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja (pegawai), peta kerja dan batasan pertahanan.

5. Isu strategis reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja

Isu Strategis dari Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Bagian RBA) pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua adalah “PENGUATAN KAPASITAS”. Penguatan Kapasitas kepada Sumber Daya Manusia yang melakukan Tupoksi nya maupun juga Penguatan Kapasitas secara Kelembagaan yang melukan Tusi Organisasi nya.

Penguatan Kapasitas dilakukan bagi Konstituen yaitu Penerima Layanan/Penerima Manfaat dari Bagian RBA yaitu :

1. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan
2. Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Kedua Konstituen diatas merupakan Penerima Layanan/Penerima Manfaat dari apa yang dilakukan oleh Bagian RBA secara konstinue setiap Tahun dan berkelanjutan.

Penguatan Kapasitas yang dilakukan setiap tahun oleh Bagian RBA melalui 3 Hal yaitu :

1) Pembinaan

Pembinaan yang sering dilakukan oleh Bagian RBA setiap tahun adalah mensosialisasikan berbagai aturan yang terkait dengan Tupoksi di Bagian RBAProses Sosialisasi ini dilakukan secara kontinue dan berkelanjutan agar terdapat pemahaman yang baik bagi Konstituen Bagian RBA.

2) Pendampingan

Setelah dilakukan Pembinaan mereka dapat melaksanakan berbagai aturan yang telah di sosialisasikan dalam Tupoksi mereka masing-masing.

3) Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Setelah Konstituen diberikan Pembinaan dan Pendampingan maka selanjutnya Bagian RBA akan melakukan tahapan selanjutnya yaitu melakukan Monev dari apa yang sudah diberikan lewat pembinaan dan Pendampingan seperti salah satunya yaitu Rencana Tindak Lanjut (RTL). Dengan adanya RTL tersebut maka proses-proses Penguatan Kapasitas akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan Konstituen.

Berikut adalah Proses Penguatan Kapasitas pada Sub Bagian Reformasi Birokrasi, Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja serta Sub Bagian Budaya Kerja.

4) Reformasi Birokrasi

Beberapa Isu Strategis dalam perjalanan Reformasi Birokrasi pada periode ketiga (2020-2024) sesuai dengan Peraturan Kementerian PANRB RI Nomor 3 Tahun 2023 yaitu Perubahan atas PERMENPANRB Nomor 25/2020 tentang Road Map RB Tahun 2020-2024 yaitu seputar 21 Indikator dalam RB General yaitu :

1. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
2. Indeks SPBE
3. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Nilai SAKIP
6. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
7. Tingkat Maturitas SPIP
8. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang
9. Sudah Diselesaikan
10. Survei Penilaian Integritas (SPI)

11. Indeks Kualitas Kebijakan
12. Indeks Reformasi Hukum
13. Tingkat Digitalisasi Arsip
14. Indeks Pembangunan Statistik
15. Indeks Tata Kelola Pengadaan
16. Opini BPK
17. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
18. Indeks Sistem Merit
19. Indeks BerAkhlak
20. Survei Kepuasan Masyarakat
21. Indeks Pelayanan Publik
22. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
23. Juga RB Tematik yaitu
24. Pengentasan Kemiskinan
25. Realisasi Investasi
26. Digitalisasi Pemerintahan (Stunting)
27. Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
28. Pengendalian Inflasi

Reformasi General dan Reformasi B Tematik ini dikawal setiap Tahun oleh Pemerintah Daerah dan di Laporkan pelaksanaannya kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI yaitu pada portal Reformasi Birokrasi Nasional PANRB yaitu www.portalrb.id

Indeks Reformasi Birokrasi juga masuk dalam penentuan besaran TPP (Tunjangan Kinerja ASN) yang dimasukkan dalam aplikasi Kemenadgri yaitu Simona. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai salah satu Penilaian dalam Tata Kelola Pemerintahan

5) Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, terdapat beberapa hal yang menunjukkan akuntabilitas kinerja masih lemah, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten, diantaranya:

1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar, terutama di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras;
3. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
4. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas;
5. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;
6. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
7. Untuk strategi ke depan dilaksanakan melalui:
8. Menyusun dan mendorong penyusunan Peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas Kinerja;
9. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;
10. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas

implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;

11. Mendorong pengembangan model percontohan yaitu suatu pemerintah daerah/wilayah yang dijadikan model penerapan prinsip good governance sehingga wilayah tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta dapat dijadikan model/ccontoh bagi pemerintah daerah lainnya.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemda kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI yaitu pada aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR). Pelaporan Kinerja Pemda ini di Laporkan setiap Awal tahun sesudah Tahun Anggaran yang lama berakhir. Pelaporan Kinerja ini yang sering kita sebut LAKIP juga LKJiP namun tetap sama Laporan nya karena masih menggunakan Dasar Hukum yang sama untuk Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja yaitu PERMENPANRB RI No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemda menjadi pintu masuk dalam menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Komponen SAKIP ada 4 (Empat) yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja, sehingga salah satu komponen penting yang di ukur untuk melihat jalannya SAKIP dalam Pemda adalah melalui Pelaporan Kinerja yang sering kita sebut LAKIP/LKj/LKjIP).

6) Budaya Kerja

Budaya Kerja merupakan Nilai-Nilai yang dianut dalam sebuah wadah/organisasi/perkumpulan. Nilai-Nilai tersebut menjadi pengikat untuk semua manusia dalam wadah/organisasi/perkumpulan dalam menjalankan Tusi wadah/organisasi/perkumpulan nya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua maka telah ada Nilai-Nilai yang dianut bagi Pemerintah Provinsi Papua yang didalam nya berisikan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan Nilai-Nilai Budaya Kerja yaitu “BerAKHLAK”

Berorientasi Pelayanan : yaitu Komitmen memberikan Pelayanan Prima demi Kepuasan Masyarakat

Akuntabel : Bertanggungjawab atas Kepercayaan yang diberikan Kompeten : yaitu Terus Belajar dan mengembangkan Kapabilitas Harmonis : yaitu Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan

Loyal : yaitu Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggunakan serta menghadapi perubahan

Kolabiratif : yaitu Membangun kerjasama yang sinergis.

Peraturan Gubernur Nomor 41/2023 tersebut baru tersusun di Tahun 2023,

jadi di Tahun 2024 hingga Tahun 2025 lebih kepada Sosialisasi kepada Konstituen/Penerima Layanan/Penerima Manfaat dari Pergub ini yaitu ASN di tiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua juga bagi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua melalui Bagian Organisasi nya.

Sub Bagian Budaya Kerja juga membuat arah kebijakan Budaya Kerja dalam bentuk Penyusunan Road Map Budaya Kerja sehingga menjadi Pijakan Bersama bagi Provinsi Papua dalam implemtasi Budaya Kerja.

Harapan dari semua nya adalah terciptanya Budaya Birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang Profesional yang ditandai oleh peningkatan Nilai Budaya Kerja oleh Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB RI yaitu terkait dengan 2 Indikator yaitu Nilai Survei

Employer dan Nilai Survei Indeks berAKHLAK yang di nilai setiap Tahun dan masuk dalam kategori Indeks Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Provinsi Papua.

Bila dikaitkan dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Papua pada Peraturan Gubernur Nomor 5/2023 tentang RPD Provinsi Papua ada keterkaitan yaitu pada point 5 melalui penyelarasan dan pertimbangan, dari 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur
3. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten

4. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;

5. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yang melaksanakan fungsi administrasi dalam pelaksanaan pembangunan sumberdaya manusia aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis juga menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan RENSTRA yang mempunyai target, sasaran yang harus dicapai.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Program/kegiatan/Sub Kegiatan direncanakan sesuai kebutuhan pelaksanaan TUSI organisasi sesuai sasaran strategis organisasi yang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD yang ditargetkan untuk Tahun 2024-2026.

RKPD merupakan bagian dari RENSTRA SKPD adanya beberapa indicator yang menjadi target dalam RKPD menjadi bagian indicator Biro Organisasi, yang direncanakan melalui musrenbang pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum PD) dengan DPRP.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tujuan Biro Organisasi yang akan dicapai untuk masa waktu pembangunan 2024-2026 adalah “Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik” merupakan target

Visi Provinsi Papua pada RPJPD yaitu **“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.”** Dan Misi ke-3 yaitu **“ untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi,** Visi tersebut memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahap IV diantaranya tersambung dari segi kemandirian pada segala bidang, dari 4 (empat) Tujuan pada RPD Tahun 2024-2026 tujuan ke 4 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik”** bersinergi dengan Tujuan pada RENSTRA Biro Organisasi yaitu **“Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik”**

Tujuan 4: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Visi dan Misi serta tujuan diaktualisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi berpedoman pada tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2023.

Untuk mendukung Visi Misi pembangunan Provinsi Papua, Biro Organisasi merumuskan tujuan yakni **“Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik”** Tujuan Biro Organisasi diatas dijabarkan pada sasaran-sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang bersinergi dengan RPD Provinsi Papua, yaitu terdiri atas 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Biro Organisasi yang bersinergi dengan Tujuan dan Sasaran pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Papua

Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode 2023	Taarget Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2026
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67	75,05	80,05	80.50	80.50
2	Nilai SAKIP	Nilai	66,05	75,39	80,05	80,50	80,50
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	95	95	95	95	95

Adapun tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Biro Organisasi dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indokator dan target Kinerja Serta Target Lima Tahun Kedepan

RENSTRA Biro Organisasi telah terintegrasi dengan RPD ta 2024-2026 dan sasaran strategis KemenPANRB.Kualitas perencanaan dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan ant ara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran RENSTRA Biro harus mendukung sasaran strategis RPD dan sasaran strategis Kementerian, Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Berikut ini adalah keterhubungan sasaran-sasaran RENSTRA Biro dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024-2026 dan RPD Provinsi Papua , sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Hubungan antara , Visi, Misi PEMDA Provinsi Papua, Biro Organisasi dan KemenPANRB R.I

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TA. 2024-2026	RENSTRA BIRO ORGANISASI TA 2024-2026	RENSTRA KEMENPANRB 2020-2024
VISI : “Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.”		Visi : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan”
MISI ke-3 “ untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi	Misi : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional. 2. Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif. 3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur	MISI : 1. . Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, 2. Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy. 3. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel 4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas. 5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani. 6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.bermartabat, dan terpercaya

PRIORITAS		
Prioritas difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai ABK 2. Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi , efektif, responsif, transparan dan akuntabel 3. Penempatan, Pengembangan dan pengendalian aparatur yang berorientasi pada ANJAB dan bermuara pada penerapan sistem merit 	Mewujudkan Integritas, profesional dan akuntabel, melayani kolaboratif, informatif dan kesempurnaan/komitmen pada kualitas
TUJUAN “		
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Terwujudnya Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing 2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang Berkualitas dan Kapabel

<p>2. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua</p> <p>3. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua</p> <p>4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> <p>5. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p>		<p>3. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsive, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi</p> <p>4. Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas, dan sejahtera</p> <p>5. Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel</p> <p>6. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas</p> <p>7. Terwujudnya kualitas pelayanan public yang prima</p> <p>8. Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional</p> <p>9. Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien</p> <p>10. Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang professional, berintegritas, dan sejahtera</p> <p>11. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel</p> <p>12. Terwujudnya kualitas pelayanan public Kementerian PANRB yang prima</p>
--	--	---

<p>Arah Kebijakan Tahun 2024</p> <p>Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2024 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan</p> <p>Arah Kebijakan Tahun 2025</p> <p>Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2025 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu <i>Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</i></p> <p>Arah Kebijakan Tahun 2026</p> <p>Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah</p>	<p>2. Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas</p>	<p>1 Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan</p> <p>2 Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit</p> <p>3 Peningkatan kualitas implementasi SAKIP</p> <p>4 Penguatan pengawasan</p> <p>5 Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan public</p> <p>6 Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi</p>
--	--	--

STRATEGI		
1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process) 2. Mengarusutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor 3. Perluasan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis e government	1 Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisisioner, dan melakukan pengumpulan data 2 Membentuk Tim penilaian kinerja pelayanan publik lintas OPD serta melakukan penilaian/pemeringkatan kinerja kepada OPD 3 Mengikutsertakan dalam bimtek sesuai TUSI 4 Melakukan koordinasi dengan OPD yang akan dipasang papan nama jabatan 5 Membuat SK. Gubernur tentang pembangian ruangan bagi OPD 6 Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur 7 Melakukan koordinasi intens dengan OPD terkait ketersediaan data LKj 8 Melakukan koordinasi intens dengan Kemendagri dan Kemenpan dan RB terkait peningkatan nilai kinerja	9 Penetapan Road Map RB 2015-2019 dan Juklak RB 10 Penetapan Undang-Undang Tentang Organisasi Pemerintah dan Grand Design Organisasi Pemerintah 11 pengendalian pengembangan sistem e- Gov dan pengadaan infrastruktur e- Gov oleh K/L/pemda 12 Penyusunan standar kompetensi jabatan bagi setiap jabatan aparatur sipil negara. 13 Penerapan pengadaan dengan sistem CAT untuk seleksi CPNS dan PPPK di K/L/pemda 14 Penguatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi K/L/Pemda. 15 Penguatan Nilai-Nilai dasar, Nilai Kode Etik dan Kode Perilaku ASN 16 Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); Penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kem PAN dan RB
PROGRAM		
Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggara Pemerintahandan Pembangunan	Penguatan kapasitas Kelembagaan	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementrian PANRB telah merumuskan visi tahun 2020-2024 yaitu “Mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia “. Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementrian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang profesional dalam melaksanakan tugasnya serta memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya, demikian halnya dengan Biro Organisasi yang mengembang visi dan misi pemerintah daerah yang lebih

mengedepankan pelayanan administrasi dan pembangunan SDM sebagai aktualisasi dari implementasi regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan keterkaitan dengan RPD Provinsi Papua nampak pada prioritas pelaksanaan visi dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program yang dilaksanakan, hal ini memberi konsekwensi bahwa Biro organisasi harus mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sehingga perencanaan dari Tahun pertama sampai tahun ke 2 ada progres capaian yang signifikan.

Ha ini sejalan dengan RENSTRA Biro organisasi yang lebih mengedepankan pelayanan administrasi dan pembangunan SDM dalam sebagai aktualisasi dari implementasi regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, demikian halnya dengan visi dan visi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sangat erat kaitannya dengan capaian pelaksanaan tugas tugas organisasi, sedangkan keterkaitan dengan RPD Provinsi Papua nampak pada prioritas pelaksanaan visi dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program yang dilaksanakan, hal ini memberi konsekwensi bahwa Biro organisasi harus mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sehingga perencanaan dari Tahun pertama sampai tahun ke lima ada progres capaian yang signifikan, sebagaimana capaian kinerja yang telah dilakukan Biro Organisasi selama hampir 5(lima) tahun masa pemerintahan Gubernur Lukas Enember di Provinsi Papua.

3.2 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2025 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 2 program, 6 kegiatan, dan 17 sub kegiatan.(Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program) tersebut dapat dilihat pada RENJA 2025 Tabel 2.1 pada lampiran.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Biro Organisasi merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan administrasi Pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Rencana Kerja Biro dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Demikian Rencana Kerja Biro ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai perencanaan strategis yang ditetapkan.

Jayapura, 26 Februari 2025



KEPALA BIRO,

**LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001**

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH PRVINSI PAPUA TAHUN 2024 - 2026

SKPD : BIRO ORGANISASI SERTA PROVINSI PAPUA

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.	PROGRAM PENUNJANG URSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Terwujudnya pelayanan administrasi umum dan jasa penunjang Biro Organisasi	Persentase OPD dalam peningkatan pelayanan administrasian jasa penunjang Biro Organisasi	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor Biro Organisasi	persentase layanan Biro Organisasi	100%		100%		100%		100%		4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.101.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi	Persentase Administrasi OPD dalam mendukung pelaksanaan TUPOKSI			100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	3 4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen RKA SKPD			1 dokumen	-	1 dokumen	6,720,000	1 dokumen	7,728,000	1 dokumen	14,448,000	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	51,000,000	1 dokumen	51,000,000	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.1.01.04	Koordinasi dan Peyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Peyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen DPA- SKPD			1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.1.01.05	Koordinasi dan Peyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Peyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD			1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.1.01.06	Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capain Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capain Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Laporan Capain Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			4 dokumen	-	4 dokumen	6,720,000	4 dokumen	7,728,000	4 dokumen	14,448,000	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Biro Organisasi	Persentase administrasi Keuangan Biro Organisasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun			100%	-	100%	8,000,000	100%	9,200,000	100%	17,200,000	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.102.07	Koordinasi dan Peyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan, Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Peyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Peyusunan laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan, Semesteran SKPD			1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.104.01	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.104.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti			Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.104.09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.104.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undagan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undagan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undagan			Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
01.105.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Biro Organisasi	Persentase Administrasi Umum Biro Organisasi			100%		100%		100%		100%		4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi

01.105.02	Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan
01.105.03	Peyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Peyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan
01.105.04	Peyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
01.105.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang di Sediakan
01.105.07	Penyediaan Bahan/ Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang di Sediakan
01.105.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Tamu
01.105.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
01.105.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
1.107	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase jasa penunjang perlengkapan kantor yang disediakan
01.107.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan
1.108	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara dan teradministrasi dengan baik	Persentase Pemeliharaan dan penertiban administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan
1.108.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya
1.108.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Terwujudnya penataan Organisasi	Persentase penataan Organisasi
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terwujudnya penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota	Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan OPD Provinsi dan Kab/Kota
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richtizing)	1. 1. Presentase OPD yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran
			1.2. Jumlah PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota
	Rapat Kerja koordinasi Bidang Organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab.Kota	Terlaksananya Rapat Kerja koordinasi Bidang Organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab.Kota	kelembagaan perangkat daerah kab/kota yang sesuai kebutuhan dan Peraturan yang berlaku
	Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kab.kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kab.kota	Cakupan monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah kab/kota

Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik

Persentase Kelembagaan perangkat daerah Provinsi

Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
Paket	24,000,000	Paket	18,000,000	Paket	20,700,000	Paket	62,700,000	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
Paket	520,115,620	Paket	184,594,000	Paket	212,283,100	Paket	916,992,720	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
Paket	101,320,540	Paket	105,401,000	Paket	121,211,150	Paket	327,932,690	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
Laporan	236,400,000	Laporan	140,000,000	Laporan	161,000,000	Laporan	537,400,000	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
Laporan	645,325,000	Laporan	358,295,000	Laporan	412,039,250	Laporan	1,415,689,250	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
persentase	-	persentase	-	persentase	-	persentase	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
Laporan	63,750,000.0	Laporan	52,830,000	Laporan	60,754,500	Laporan	177,334,500	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
persentase	100%	persentase	100%	persentase	100%	persentase	100%	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
Unit	157,232,000	Unit	62,280,000	Unit	71,622,000	Unit	291,134,000	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
3 Unit	3	3 Unit	65,000,000	Unit	74,750,000	Unit	Rp139,750,000.00	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
persentase	-	persentase	-	persentase	-	persentase	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
dokumen	100%	dokumen	100%	dokumen	100%	dokumen	100%	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
100%	350,000,000	100%	250,000,000	100%	287,500,000	100%	887,500,000	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
1 PERDA dan 43 PERGUB		1 PERDA dan 43 PERGUB		1 PERDA dan 47 PERGUB		1 PERDA dan 47 PERGUB		4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
10 PERGUB UPT dan Cabang Dinas		10 PERGUB UPT dan Cabang Dinas		12 PERGUB UPT dan Cabang Dinas		12 PERGUB UPT dan		4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
9 kab.kota	600,000,000	9 kab.kota	499,751,000	9 kab.kota	574,713,650	9 kab.kota	1,674,464,650	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
9 kab.kota	-	9 kab.kota	-	9 kab.kota	-	9 kab.kota	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi
35%	-	35%	-	30%	-	100%	-	4.01.000.0.00.0.05. Biro Organisasi

4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Terlaksananya penataan SDM aparatur yang kompeten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis jabatan , Analisis beban kerja dan Evaluasi jabatan	Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai	100%	1,149,997,450	100%	500,000,000	100%	575,000,000	100%	2,224,997,450	4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Reformasi Birokrasi, SAKIP dan budaya kerja Pemerintah	Persentase Tatalaksana pemerintahan yang efisien , efektif, responsif, transparan dan akuntabel	dokumen/laporan		dokumen/laporan		dokumen/laporan		dokumen/lapor		4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Papua	1. Presentase SKPD Provinsi yang melaksanakan Reformasi Birokrasi; 2. Predikat penilaian PMPRB Provinsi Papua 3. Presentase Kab/kota yang		60%	300,002,000	80%	299,028,000	100%	343,882,200	100%	942,912,200	dokumen/laporan
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi akuntabilitas kinerja	1. Nilai evaluasi Sakip Provinsi Papua; 2. Presentase SKPD yang mengumpulkan Sakip; 3. Presentase kab/kota yang melaporkan Sakip.		B	-	B		BB		A		4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya Evakuasi Pelaksanaan Budaya Kerja pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	1. Presentase SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan Budaya Kerja; 2. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja dalam pelaksanaan tugas; 3. Presentase ASN di		40%	-	60%		80%		100%		4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
4.01.02.1.02.04	Fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitasi peningkatan pelayanan publik di Provinsi dan Kab/Kota	Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi		B	299,999,900	BB	299,942,000	A	344,933,300	A	944,875,200	4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
4.01.02.1.02.05	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan tatalaksana pemerintahan	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur Persentase SKPD yang memiliki SOP yang sesuai dengan Tugas Pokok dan /Fungsi Jumlah SKPD yang di evaluasi penerapan SOP-nya Persentase SKPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama		100%	-	100%		100%		100%		4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
					80%	-	90%		95%		100%		4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
					40%	99,999,900	60%	299,968,000	80%	344,963,200	100%	744,931,100	4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
					100%	-					100%		4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
					15%	-	20%		30%		50%		4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
					20%	369756900	50%	485,577,000	100%	558,413,550	-	1,413,747,450	4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
					100%		100%		100%		100%		4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
					30%	-	60%		100%				4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
					-	300,002,200	60%	499,675,000	100%	574,626,250		1,374,303,450	4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
					-	-	100%		100%		100%		4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
					15 SKPD	-	10 SKPD		15 SKPD		-		4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi
					-	-	100%		100%		100%		4.01.0.00.0.00.0.05. Biro Organisasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Neg



**RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO ORGANISASI PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025**

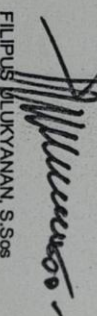
NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITYAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		BIRO ORGANISASI						6.579.988.000,00							
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						6.579.988.000,00							
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						6.579.988.000,00							
	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3.979.988.000,00							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00							
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.486.058.000,00							
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						56 Orang/ Bulan							
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.476.058.000,00							
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						1 Laporan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALIU BENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kabikab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningta lan Tata Kelola Pem ertintahan	-	-	30.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	120.000.000,00	-	-	-	3. Peningta lan Tata Kelola Pem ertintahan	-	-	500.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	50 Orang	120.000.000,00	Semua Kabikab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningta lan Tata Kelola Pem ertintahan	-	-	500.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1.197.000.800,00	Semua Kabikab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningta lan Tata Kelola Pem ertintahan	-	-	3.587.216.000,00	BIRO ORGANISASI
		Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	-	-	-	35 Paket	67.000.000,00	Semua Kabikab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningta lan Tata Kelola Pem ertintahan	-	-	350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	5 Paket	10.000.000,00	Semua Kabikab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningta lan Tata Kelola Pem ertintahan	-	-	60.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Paket	24.000.000,00	Semua Kabikab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningta lan Tata Kelola Pem ertintahan	-	-	24.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	12 Paket	224.550.000,00	Semua Kabikab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningta lan Tata Kelola Pem ertintahan	-	-	850.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KAMU PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2023	PACU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET TAHUN 2023	PACU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Penyediaan Bahan/Material					56 Paket	101.129.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peninggia tan Tala Kelola Pem eliharaan			211.419.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				200 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peninggia tan Tala Kelola Pem eliharaan			312.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	645.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peninggia tan Tala Kelola Pem eliharaan			1.759.900.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah						107.600.000,00				3. Peninggia tan Tala Kelola Pem eliharaan			176.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	63.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peninggia tan Tala Kelola Pem eliharaan			110.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	43.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peninggia tan Tala Kelola Pem eliharaan			66.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						59.329.200,00				3. Peninggia tan Tala Kelola Pem eliharaan			150.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAU INDIKATIF (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperkirakan dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	59.329.200,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peningta an Taha kelida Pem erintahan								
2	4.01.02	PROGRAM PEMATAAN ORGANISASI						2.600.000.000,00												
	4.01.02.1.01	Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						1.350.000.000,00				3. Peningta an Taha kelida Pem erintahan								
	4.01.02.1.01.0001	Facilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
	4.01.02.1.01.0002	Facilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				44 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peningta an Taha kelida Pem erintahan								
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				9 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peningta an Taha kelida Pem erintahan								
	4.01.02.1.02	Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						1.250.000.000,00				3. Peningta an Taha kelida Pem erintahan								
	4.01.02.1.02.0001	Penataan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peningta an Taha kelida Pem erintahan								
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peningta an Taha kelida Pem erintahan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKTIKUM CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKTIKUM MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								PAGU INDIKATIF (Rp)	NASIONAL	DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budgets Kerja			1 Laporan	100.000.000,00		Semua Kotak/ab, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peringkat dan Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
4.01.02.1.02.0004		Pengelolaan Tataaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Rata Rata Pelaksanaan Pemerintahan			1 Dokumen	300.000.000,00		Semua Kotak/ab, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peringkat dan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
4.01.02.1.02.0005		Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			1 Dokumen	250.000.000,00		Semua Kotak/ab, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3. Peringkat dan Tata Kelola Pemerintahan			800.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
J U M L A H								6.579.988.000,00							14.705.672.200,00			

MENGETAHUI,
 PIN KARO BIRO ORGANISASI

 FILIPUS LUKYANAN, S.Sos
 PEMBINA TKI
 NIP. 19660929 199203 1 004